

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	8
1.5.2. Pendekatan (<i>Approach</i>).....	8
1.5.3. Bahan Hukum (<i>Legal Source</i>).....	9
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5. Analisis Bahan Hukum	11

1.6. Pertanggungawaban Sistematika	11
BAB II KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM KOPERASI DAN	
ANGGOTANYA KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	13
2.1. Jenis -Jenis Simpanan pada Koperasi Simpanan Pinjam	13
2.1.1 Simpanan Pokok	13
2.1.2 Simpanan Wajib	14
2.1.3 Tabungan.....	16
2.1.4 Simpanan Berjangka	17
2.2. Hubungan Hukum Koperasi Simpan Pinjam dengan Anggotanya	
berdasarkan Undang Perlindungan Konsumen	20
2.2.1 Anggota Koperasi Simpan Pinjam sebagai Pemilik	
(Pelaku Usaha)	24
2.2.2 Anggota Koperasi Simpan Pinjam sebagai Pengguna Jasa Koperasi	
(Konsumen).....	28
2.2.3 Calon Anggota sebagai Kosumen	28
2.2.4 Hubungan Hukum	29
BAB III TANGGUNG GUGAT BADAN HUKUM KOPERASI TERHADAP	
ANGGOTANYA ATAS ADANYA KEGAGALAN PEMBAYARAN	
KEUNTUNGAN SIMPANAN BERJANGKA	33
3.1 Tanggung Gugat	33
3.1.1 Dasar Gugatan Konsumen.....	34

3.1.2 Tanggung gugat Pemilik KSP terhadap Anggota Pengguna Jasa Simpanan Berjangka	39
3.2 Simpanan Berjangka: Risiko dan Kajian Kasus	41
2.2.1 Risiko Penyebab Kegagalan Pembayaran Simpanan Berjangka	41
2.2.2 Kajian Kasus Kegagalan Pembayaran Simpanan Berjangka	45
3.3 Penyelesaian Sengketa Konsumen	47
3.3.1 Penyelesaikan Sengketa melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen	48
3.3.2 Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan	49
BAB IV PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
DAFTAR BACAAN	53

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)
(Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 19).

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
No: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh
Koperasi

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 06/M-DAG/Per/2/2017